Arti dan Penerapan Istilah Aksiologi

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudyct.com/cv.pdf

IBM-ASMI **|** ***RudyCT Academic Series***

Abstract

Axiology is the philosophical study of value: what is valuable, why it matters, how values relate or conflict, and how judgments of worth can be justified. It includes questions about moral, aesthetic, social, political, cultural, epistemic, and practical value. In research, axiology concerns the values that shape the choice of a problem, relationships with participants, interpretation of evidence, and use of findings. In organizations, it helps explain how declared values become—or fail to become—daily practices, decisions, incentives, and technology design. This article clarifies axiology in relation to ontology, epistemology, ethics, and methodology; distinguishes intrinsic and instrumental value; reviews major ways of understanding values; and presents applications in research, management, education, public policy, sustainability, and artificial intelligence. Cases involving school assessment, hospital care, employee performance, and AI assisted selection show how value commitments affect practical choices. A stepwise framework is offered for identifying stakeholders, articulating values, examining conflicts, and evaluating consequences. Axiological analysis does not provide a mechanical formula for choosing one universal good. Its contribution is to make priorities and tradeoffs visible, test whether decisions are coherent with declared purposes, and ensure that affected people can question how value judgments are translated into practice.

Keywords: axiology; value theory; ethics; intrinsic value; instrumental value; research paradigm; organizational values; responsible AI.

Pendahuluan

Setiap keputusan penting mengandung penilaian tentang apa yang layak diperhatikan. Sekolah menentukan apakah keberhasilan terutama berarti nilai ujian, pertumbuhan karakter, keterampilan praktis, atau kemampuan hidup bersama. Rumah sakit menimbang kecepatan layanan, keselamatan pasien, martabat, dan pemerataan akses. Perusahaan mengalokasikan sumber daya antara keuntungan jangka pendek, pengembangan pegawai, mutu produk, dan tanggung jawab lingkungan. Keputusan-keputusan tersebut melibatkan fakta, tetapi fakta saja tidak menetapkan tujuan mana yang patut diutamakan. Pertanyaan mengenai nilai inilah yang menjadi ruang kajian aksiologi.

Aksiologi sering disebut sebagai cabang filsafat yang mempelajari nilai. Istilah ini merangkum pertanyaan tentang apa yang baik, bernilai, indah, adil, berguna, benar untuk diketahui, atau patut dikejar. Dalam pengertian luas, teori nilai mencakup banyak wilayah filsafat yang bersifat evaluatif; dalam penggunaan yang

lebih sempit, aksiologi berfokus pada hakikat dan susunan nilai itu sendiri (Schroeder, 2026). Karena nilai hadir dalam pengalaman personal sekaligus kehidupan bersama, kajian aksiologi menjembatani filsafat moral, estetika, teori politik, psikologi, pendidikan, ekonomi, dan ilmu manajemen.

Dalam penelitian, istilah aksiologi biasanya digunakan untuk menanyakan nilai apa yang membimbing penelitian dan konsekuensi apa yang mungkin timbul dari pengetahuan yang dihasilkan. Peneliti memilih topik tertentu, memutuskan siapa yang didengar, menetapkan indikator, menginterpretasikan data, dan menyebarkan temuan. Pilihan tersebut tidak selalu bebas nilai. Menyadari hal itu tidak berarti penelitian menjadi tidak ilmiah. Justru keterbukaan tentang nilai dan prosedur pengendaliannya membantu pembaca menilai ketelitian, keadilan, serta batas suatu kesimpulan (Brown & Dueñas, 2020).

Artikel ini membahas arti aksiologi dan penerapannya dengan bahasa yang dapat digunakan dalam kuliah, penyusunan proposal, dan keputusan organisasi. Pembahasan memisahkan konsep nilai dari tindakan etis, menerangkan hubungan aksiologi dengan ontologi dan epistemologi, lalu memberi contoh penerapan dalam manajemen, pendidikan, layanan kesehatan, kebijakan publik, keberlanjutan, dan kecerdasan buatan. Pokok utamanya adalah bahwa analisis aksiologis menolong kita menamai apa yang sedang diprioritaskan, memeriksa siapa yang memperoleh manfaat atau menanggung beban, dan mempertanggungjawabkan bagaimana nilai diterjemahkan menjadi tindakan.

1. Arti istilah aksiologi

Kata aksiologi berakar pada bahasa Yunani axios, yang berarti bernilai atau layak, dan logos, yang berarti pembahasan atau ilmu. Secara etimologis, aksiologi dapat dipahami sebagai kajian tentang nilai. Namun, nilai sendiri bukan konsep yang sederhana. Sesuatu dapat disebut bernilai karena diinginkan, karena bermanfaat, karena dianggap baik pada dirinya, karena memenuhi kewajiban, karena menyumbang kesejahteraan, atau karena dihargai dalam suatu tradisi. Pertanyaan aksiologis bukan hanya “berapa nilainya?” melainkan juga “nilai menurut siapa, berdasarkan alasan apa, dan dengan akibat bagi siapa?”

Aksiologi menelaah nilai pada beberapa tingkatan. Tingkat pertama ialah nilai yang dilekatkan pada objek atau keadaan, misalnya kesehatan, keindahan karya, kepercayaan publik, atau pengetahuan. Tingkat kedua ialah standar yang dipakai untuk menilai objek tersebut, seperti manfaat, keadilan, kebenaran, kebebasan, atau kesetiaan. Tingkat ketiga menyelidiki bagaimana standar itu dapat dibenarkan dan bagaimana konflik antarnilai sebaiknya dipertimbangkan. Dengan demikian, aksiologi bukan sekadar inventarisasi daftar nilai organisasi. Ia juga menguji hubungan antara nilai, alasan, pilihan, dan akibat.

Istilah value theory kadang digunakan lebih luas daripada aksiologi. Teori nilai dapat mencakup teori tentang kebaikan, kesejahteraan, kewajiban moral, nilai estetis, nilai epistemik, serta evaluasi sosial dan politik. Batas istilah berbeda menurut tradisi akademik. Dalam artikel ini, aksiologi digunakan secara luas untuk membahas apa yang dianggap bernilai dan bagaimana penilaian itu memengaruhi tindakan, dengan tetap membedakan persoalan nilai dari pertanyaan yang lebih khusus dalam etika normatif.

Nilai tidak selalu berupa benda atau sesuatu yang dapat dihitung. Kejujuran, rasa aman, kompetensi, keindahan, dan kebebasan lebih tepat dipahami sebagai kualitas atau alasan yang memberi arah pada pilihan. Sebuah organisasi dapat menyebut integritas sebagai nilai, tetapi integritas baru terlihat melalui keputusan nyata: apakah laporan kesalahan dibuka, apakah konflik kepentingan diungkap, dan apakah pemimpin menerapkan standar yang sama pada dirinya sendiri. Karena itu, nilai memiliki sisi konseptual dan sisi praktis. Nilai dinyatakan dengan kata-kata, tetapi diuji melalui pola tindakan dan konsekuensi.

2. Ragam nilai dan cara membedakannya

Nilai moral berkaitan dengan pertanyaan mengenai benar dan salah, kewajiban, hak, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan terhadap sesama. Nilai estetis menilai keindahan, bentuk, ekspresi, dan pengalaman artistik. Nilai sosial berkaitan dengan kualitas hubungan, solidaritas, kepercayaan, dan rasa memiliki. Nilai politik mencakup kebebasan, kesetaraan, partisipasi, keamanan, dan legitimasi kekuasaan. Nilai epistemik meliputi kebenaran, ketepatan, konsistensi, keterbukaan terhadap bukti, dan kemampuan menjelaskan. Dalam praktik, satu keputusan dapat memuat beberapa jenis nilai sekaligus.

Sebuah laporan penelitian, misalnya, memiliki nilai epistemik apabila metodenya dapat dipercaya dan kesimpulannya didukung bukti. Ia memiliki nilai sosial apabila pengetahuannya membantu masyarakat memahami persoalan. Ia memuat nilai moral ketika prosesnya menghormati peserta, melindungi privasi, dan tidak memanipulasi hasil. Kualitas visual laporan dapat pula membawa nilai estetis dan komunikatif. Membeda-bedakan kategori nilai membantu analisis menjadi lebih terarah, tanpa menganggap bahwa kategori tersebut selalu berdiri terpisah.

Pembedaan penting lainnya adalah nilai intrinsik dan instrumental. Sesuatu bernilai intrinsik apabila dianggap berharga pada dirinya, bukan semata-mata sebagai sarana menuju tujuan lain. Sesuatu bernilai instrumental karena membantu mencapai tujuan. Kesehatan dapat bernilai pada dirinya bagi seseorang, sekaligus instrumental karena mendukung kemampuan bekerja dan berinteraksi. Pendidikan dapat dianggap berharga sebagai perkembangan pemahaman, sekaligus menjadi sarana mobilitas sosial. Satu hal dapat memiliki kedua jenis nilai, sehingga pembedaan ini tidak selalu membagi objek ke dalam dua kotak yang saling meniadakan.

Nilai instrumental perlu dievaluasi dengan menanyakan tujuan yang dilayaninya. Efisiensi adalah nilai penting ketika sumber daya terbatas, tetapi efisiensi selalu berarti hubungan antara input dan hasil tertentu. Jika yang dihitung hanya kecepatan penyelesaian berkas, sistem mungkin efisien pada indikator itu sambil memperburuk akses kelompok yang memerlukan bantuan tambahan. Peningkatan produktivitas pun bukan kebaikan yang terpisah dari pertanyaan tentang mutu hasil, keselamatan, keberlanjutan, dan distribusi manfaat.

Nilai dapat bersifat individual atau kolektif, eksplisit atau implisit, stabil atau berubah, dan saling melengkapi atau bertentangan. Pegawai dapat menghargai otonomi, sementara organisasi mengutamakan standardisasi. Masyarakat dapat menghargai inovasi dan sekaligus kehati-hatian. Dalam konflik semacam itu, menyebut salah satu nilai sebagai “yang utama” belum cukup. Perlu ditentukan ruang lingkup, kelompok yang terdampak, batas hak, dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memilih suatu tindakan.

3. Aksiologi dalam hubungan dengan cabang filsafat lain

Ontologi bertanya tentang apa yang ada dan bagaimana realitas tersusun. Epistemologi menelaah apa yang dapat diketahui, bagaimana pengetahuan diperoleh, dan apa yang membenarkan suatu klaim. Aksiologi menanyakan apa yang bernilai dan bagaimana nilai membimbing penilaian serta tindakan. Metodologi menjelaskan logika umum penelitian, sedangkan metode menunjuk pada teknik pengumpulan atau analisis data. Keempatnya berhubungan: pandangan tentang realitas memengaruhi apa yang dapat diketahui; cara mengetahui memengaruhi bukti yang digunakan; dan nilai memengaruhi masalah apa yang dianggap penting serta penggunaan hasilnya.

Dalam sebuah penelitian tentang kualitas pelayanan sekolah, ontologi dapat mencakup siswa, guru, proses pembelajaran, hasil belajar, dan lingkungan sekolah sebagai entitas yang relevan. Epistemologi dapat menetapkan bahwa pengetahuan diperoleh melalui kombinasi data hasil belajar, observasi, dan pengalaman

peserta. Aksiologi mengungkap mengapa kualitas itu penting, siapa yang berhak menentukan indikator, dan apakah peningkatan hasil akademik seimbang dengan kesejahteraan siswa. Metodologi kemudian merancang cara menjawab pertanyaan, sementara metode menentukan langkah praktis seperti survei, observasi kelas, atau analisis dokumen.

Ketidakselarasan dapat terjadi bila sebuah studi mengumumkan nilai partisipasi tetapi hanya mengambil keputusan berdasarkan suara manajemen; atau menyatakan keadilan sebagai tujuan, tetapi indikatornya hanya mengukur rata-rata yang menutupi kesenjangan. Analisis aksiologis menolong peneliti membandingkan komitmen yang dinyatakan dengan keputusan desain yang diambil. Ia tidak meminta semua peneliti memiliki nilai yang sama. Ia meminta agar relevansi nilai terhadap rancangan dan interpretasi dapat ditelusuri secara terbuka.

Aksiologi juga berkaitan erat dengan etika, tetapi keduanya tidak persis sama. Etika menelaah prinsip, kewajiban, karakter, dan standar tindakan yang benar. Aksiologi membahas wilayah nilai yang lebih luas, termasuk nilai estetis, epistemik, sosial, dan instrumental. Etika dapat dipahami sebagai salah satu bagian penting dari refleksi aksiologis ketika pertanyaan beralih kepada apa yang wajib dilakukan dan bagaimana memperlakukan orang secara layak. Sebaliknya, pertanyaan tentang apakah suatu temuan menarik, indah, atau berguna dapat bersifat aksiologis tanpa menjadi persoalan etika langsung.

Pembedaan ini berguna dalam proposal penelitian. Pernyataan “penelitian ini menggunakan metode survei” tidak menjawab nilai apa yang membimbing penelitian. Pernyataan “peneliti menghormati peserta” merupakan komitmen etis, tetapi belum menerangkan mengapa topik dipilih, siapa yang memperoleh manfaat, atau bagaimana hasil dibagikan. Rumusan aksiologi yang baik menghubungkan tujuan penelitian, pemilihan bukti, relasi dengan partisipan, interpretasi, dan rencana pemanfaatan pengetahuan.

4. Teori nilai dan perdebatan filosofis

Salah satu perdebatan mendasar menyangkut apakah nilai ditemukan atau diciptakan, objektif atau relatif, berlaku universal atau bergantung pada konteks. Realisme nilai berpendapat bahwa setidaknya sebagian nilai memiliki dasar yang tidak hanya bergantung pada preferensi individu. Pendekatan subjektivis menghubungkan nilai dengan sikap, keinginan, pengalaman, atau respons manusia. Konstruktivisme menekankan bahwa nilai dan norma dapat terbentuk melalui proses sosial, argumentasi, sejarah, dan praktik bersama. Tiap pendekatan menawarkan penjelasan berbeda tentang mengapa orang menghargai sesuatu dan bagaimana konflik nilai dapat dinilai.

Jika nilai dianggap sepenuhnya subjektif, sulit menjelaskan kritik terhadap preferensi yang merugikan orang lain. Jika nilai dianggap sepenuhnya objektif dan telah diketahui tanpa perdebatan, sulit menjelaskan keragaman budaya dan perubahan pemahaman moral. Banyak diskusi kontemporer berusaha menjelaskan hubungan antara dasar nilai, pertimbangan rasional, pengalaman, dan konteks sosial tanpa menyederhanakan satu sisi. Dalam kebijakan publik, misalnya, prinsip martabat manusia mungkin diperlakukan sebagai batas moral yang luas, sementara cara mewujudkannya perlu disesuaikan dengan konteks dan bukti yang tersedia.

Teori konsekuensialis menilai tindakan melalui akibatnya, seperti kesejahteraan yang dihasilkan atau kerugian yang dicegah. Teori deontologis memberi penekanan pada kewajiban, hak, dan batas yang tidak boleh dilanggar walaupun pelanggaran tampak menghasilkan manfaat agregat. Etika kebajikan memusatkan perhatian pada karakter dan disposisi pelaku, seperti kejujuran, kebijaksanaan, dan keberanian. Ketiganya sering hadir sebagai kerangka berbeda dalam analisis keputusan manajerial. Ketika rumah sakit membagi sumber daya langka, pertimbangan hasil kesehatan, hak pasien, serta integritas profesional dapat memberi alasan yang sama-sama penting tetapi tidak selalu mudah disatukan.

Teori nilai juga mengkaji hubungan antarnilai. Sebagian nilai dapat saling memperkuat; transparansi dan akuntabilitas, misalnya, sering berjalan bersama. Nilai lain dapat berkonflik pada situasi tertentu. Kecepatan pengambilan keputusan dapat berbenturan dengan konsultasi luas; kerahasiaan dapat berbenturan dengan kebutuhan keterbukaan; kebebasan bereksperimen dapat berbenturan dengan keselamatan. Tidak selalu ada algoritma yang menyelesaikan konflik ini. Analisis yang baik mengidentifikasi nilai yang terlibat, menilai alasan dan akibat, menetapkan batas yang relevan, dan mencatat siapa yang membuat keputusan.

Aksiologi tidak menyamakan "yang bernilai" dengan "yang populer". Sesuatu dapat disukai banyak orang tetapi tetap dapat dipersoalkan secara moral. Sebaliknya, kebijakan yang melindungi kelompok minoritas mungkin tidak mendapat dukungan mayoritas pada awalnya. Karena itu, data preferensi publik dapat menjadi bukti penting tentang sikap masyarakat, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa preferensi tersebut adil atau benar. Perbedaan antara fakta deskriptif dan penilaian normatif perlu dijaga.

Dalam praktik, pengambilan keputusan sering memerlukan urutan penilaian. Sebagian nilai dapat diperlakukan sebagai syarat minimum yang tidak boleh dilanggar, seperti keselamatan dasar atau larangan diskriminasi. Nilai lain dapat dipertukarkan dalam batas tertentu, misalnya biaya dan kecepatan layanan. Pendekatan ini membantu tim membedakan batas moral dari preferensi yang dapat dinegosiasikan. Jika semua nilai dimasukkan ke dalam satu kalkulasi, hak dasar seseorang berisiko diperlakukan seperti variabel biaya yang dapat ditebus dengan keuntungan agregat.

Pertimbangan nilai juga dapat berubah ketika informasi baru tersedia. Sebuah keputusan yang tampak wajar sebelum penerapan mungkin menimbulkan akibat yang berbeda setelah diuji. Oleh sebab itu, keputusan yang bertanggung jawab tidak hanya memilih alternatif pada satu waktu, tetapi juga menetapkan indikator peninjauan, ambang untuk intervensi, dan pihak yang dapat meminta evaluasi. Sikap revisibel bukan tanda bahwa nilai tidak penting; ia mengakui bahwa pemahaman manusia tentang akibat dan cara mewujudkan nilai dapat berkembang.

5. Teori nilai manusia dan budaya

Dalam psikologi sosial, penelitian nilai membantu menjelaskan tujuan yang memotivasi individu dan pola prioritas yang mereka susun. Schwartz (1992, 2012) mengembangkan teori nilai dasar manusia yang menggambarkan kelompok nilai dalam struktur motivasional melingkar. Nilai tertentu dapat saling mendukung, sedangkan yang lain menyatakan ketegangan motivasional. Versi teori yang diperbarui memetakan 19 nilai yang lebih terperinci dan menguji susunannya dalam berbagai sampel lintas negara (Schwartz et al., 2012). Temuan seperti ini berguna untuk memahami orientasi, tetapi tidak berarti seluruh individu dalam satu budaya memiliki prioritas identik.

Nilai berbeda dari sikap, keyakinan, norma, dan ciri kepribadian. Sikap biasanya merupakan evaluasi terhadap objek tertentu; keyakinan menyatakan apa yang dianggap benar; norma menyatakan harapan perilaku; ciri kepribadian menggambarkan kecenderungan yang relatif bertahan. Nilai cenderung lebih luas dan dapat membimbing pilihan lintas situasi. Seseorang yang menghargai kebebasan dapat bersikap berbeda terhadap kebijakan tertentu, bergantung pada informasi dan konteks, tetapi nilai kebebasan tetap menjadi alasan yang dianggap penting.

Penelitian nilai lintas budaya memerlukan kehati-hatian konseptual dan metodologis. Istilah yang tampak setara dalam terjemahan belum tentu memiliki nuansa serupa. Pengukuran perlu memeriksa kesetaraan makna, gaya respons, dan struktur dimensi. Hasil survei dapat menunjukkan pola kecenderungan kelompok, tetapi tidak patut digunakan untuk memberi label kaku pada individu. Nilai juga dapat berubah karena pengalaman hidup, perubahan institusi, pendidikan, kondisi ekonomi, dan interaksi antargenerasi.

Di Indonesia, penerapan teori nilai dapat memperkaya analisis organisasi dan kebijakan apabila disandingkan dengan konteks lokal. Misalnya, orientasi terhadap keluarga, gotong royong, agama, pencapaian, keamanan ekonomi, atau kehormatan sosial dapat memengaruhi cara orang menilai perubahan di tempat kerja. Peneliti tidak boleh menganggap satu istilah budaya mewakili semua masyarakat Indonesia. Variasi wilayah, kelas sosial, usia, agama, profesi, dan pengalaman institusional perlu diperhatikan melalui desain penelitian yang memadai.

6. Aksiologi dalam paradigma dan praktik penelitian

Aksiologi penelitian menanyakan nilai apa yang memandu proses memperoleh dan menggunakan pengetahuan. Pertanyaannya meliputi: mengapa masalah ini dipilih; siapa yang menentukan bahwa masalah tersebut penting; kelompok mana yang diuntungkan atau dirugikan oleh hasilnya; bagaimana peneliti mengelola konflik kepentingan; dan bagaimana temuan disampaikan kepada peserta maupun masyarakat. Pertanyaan tersebut dapat dimasukkan ke dalam refleksi desain penelitian, bukan hanya menjadi satu paragraf formal di proposal.

Dalam riset kuantitatif, nilai ikut berperan saat peneliti memilih konstruk, mengembangkan indikator, menentukan ambang keberhasilan, menetapkan populasi, dan memilih model analisis. Jika efektivitas program hanya dinilai dari jumlah peserta yang hadir, nilai akses atau kehadiran menjadi prioritas, sementara mutu pengalaman dan dampak jangka panjang mungkin tidak terwakili. Jika indikator ditetapkan oleh lembaga pemberi dana tanpa konsultasi dengan penerima layanan, ukuran keberhasilan dapat lebih mencerminkan kepentingan pelapor daripada pengalaman masyarakat.

Dalam riset kualitatif, relasi peneliti dan partisipan menjadi aspek aksiologis yang nyata. Peneliti memutuskan pertanyaan apa yang diajukan, pengalaman siapa yang dikutip, dan konteks apa yang ditafsirkan. Refleksivitas berarti memeriksa bagaimana posisi, asumsi, kepentingan, serta hubungan peneliti memengaruhi interaksi dan interpretasi. Refleksivitas bukan pengakuan bahwa semua interpretasi sama sah. Ia menyediakan jejak agar pembaca dapat menilai bagaimana kesimpulan dibentuk dan batas apa yang menyertainya.

Pertimbangkan penelitian mengenai beban kerja guru. Peneliti dapat menetapkan bahwa keluaran belajar siswa merupakan ukuran utama keberhasilan, atau memperluas perhatian ke waktu persiapan, kesejahteraan guru, kualitas relasi, dan ketimpangan sumber daya antar sekolah. Pilihan tersebut mencerminkan nilai dan berdampak pada temuan. Untuk menjaga ketelitian, peneliti dapat menerangkan dasar pemilihan indikator, melibatkan pemangku kepentingan, melaporkan variasi hasil, dan membedakan apa yang secara langsung didukung data dari rekomendasi normatif.

Aksiologi tidak menuntut peneliti menyembunyikan nilai agar tampak netral. Ia mendorong pemisahan yang jelas antara bukti dan penilaian, sekaligus pengakuan bahwa pilihan penelitian memiliki konsekuensi. Peneliti dapat berusaha objektif dengan menggunakan prosedur yang terbuka, menguji penjelasan alternatif, mengungkap keterbatasan, dan menyimpan jejak analisis. Nilai seperti kejujuran, akurasi, keadilan terhadap peserta, dan keterbukaan terhadap koreksi menjadi bagian dari praktik ilmiah yang bertanggung jawab.

Komite etik dan persetujuan peserta merupakan bagian penting, tetapi tidak mencakup seluruh pertanyaan aksiologi. Persetujuan memastikan bahwa peserta memahami keterlibatan tertentu, namun pilihan topik dan cara hasil dipakai tetap perlu dipikirkan. Penelitian yang patuh pada prosedur formal masih dapat menghasilkan rekomendasi yang mengabaikan kelompok tertentu jika suara mereka tidak hadir dalam perumusan masalah. Karena itu, tata kelola etik sebaiknya disertai refleksi mengenai manfaat, risiko, distribusi dampak, dan akses terhadap hasil.

Dalam penelitian campuran, keputusan mengenai bobot bukti juga mengandung penilaian. Data statistik dapat menunjukkan pola luas, sementara wawancara mengungkap makna dan mekanisme di balik pola itu. Jika peneliti hanya mengutamakan hasil kuantitatif karena dianggap lebih mudah dibandingkan, pengalaman yang tidak tercakup dalam kategori survei bisa terabaikan. Sebaliknya, narasi kasus tidak selalu menunjukkan prevalensi suatu pengalaman pada seluruh populasi. Integrasi yang baik menjelaskan kontribusi dan batas setiap jenis bukti, serta alasan mengapa keduanya diperlukan untuk menjawab pertanyaan.

Nilai keterbukaan ilmiah perlu diseimbangkan dengan kerahasiaan dan perlindungan peserta. Berbagi data dapat meningkatkan verifikasi dan penggunaan ulang, tetapi data sensitif dapat mengidentifikasi individu atau komunitas meskipun nama dihapus. Peneliti sebaiknya menentukan sejak awal data apa yang dapat dibagikan, dalam bentuk apa, dengan persyaratan akses seperti apa, dan risiko apa yang harus dikurangi. Keputusan ini menunjukkan bahwa nilai sains terbuka tidak menghapus kewajiban menjaga privasi; keduanya perlu dirancang bersama.

7. Penerapan dalam manajemen organisasi

Organisasi menyatakan nilai melalui visi, kode etik, slogan, dan kebijakan. Akan tetapi, nilai yang diumumkan tidak selalu sama dengan nilai yang dipraktikkan. Sebuah institusi dapat menyebut keselamatan sebagai prioritas utama, tetapi target produksi yang tidak realistis dapat mendorong pegawai mengabaikan prosedur keselamatan. Perusahaan dapat menyatakan inklusivitas, sementara pola promosi dan pembagian kesempatan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Analisis aksiologis membandingkan nilai yang dinyatakan dengan insentif, keputusan, rutinitas, dan pengalaman pegawai.

Nilai organisasi berfungsi sebagai dasar pertimbangan ketika aturan tertulis tidak memberi jawaban lengkap. Pegawai menghadapi situasi dengan informasi terbatas, tuntutan waktu, dan kepentingan yang beragam. Nilai seperti integritas, pelayanan, keadilan, atau kehati-hatian dapat membantu memilih tindakan. Agar berfungsi, nilai harus diterjemahkan ke contoh perilaku dan proses keputusan. “Integritas” menjadi lebih operasional apabila organisasi menjelaskan cara mengungkap konflik kepentingan, memperbaiki laporan, menolak gratifikasi, serta melindungi pelapor dengan iktikad baik.

Ketegangan nilai adalah bagian normal dari manajemen. Target pertumbuhan dapat berbenturan dengan kehati-hatian finansial; standardisasi dapat berbenturan dengan kebutuhan lokal; transparansi dapat berbenturan dengan kerahasiaan yang sah; orientasi pelanggan dapat berbenturan dengan beban kerja pegawai. Pimpinan perlu menentukan siapa yang memiliki kewenangan, nilai apa yang berfungsi sebagai batas, data apa yang relevan, dan alasan mana yang dapat dijelaskan kepada pihak terdampak. Menyebut konflik sebagai “trade-off” tidak menggantikan kewajiban untuk menilai dampak distribusinya.

Aksiologi juga membantu manajemen kinerja. Indikator bukan alat netral: ia memberi perhatian, mengarahkan sumber daya, dan menciptakan insentif. Jika dosen dinilai hanya dari jumlah publikasi, institusi menyatakan bahwa volume lebih penting daripada mutu, pengajaran, pembimbingan, atau kontribusi kolaboratif. Jika rumah sakit hanya menilai waktu tunggu, staf dapat didorong mempercepat antrean tanpa menyelesaikan persoalan kualitas komunikasi. Sistem pengukuran perlu mencerminkan nilai yang hendak diwujudkan dan menguji perilaku tak diinginkan yang mungkin muncul.

Pengelolaan perubahan pun memerlukan pertimbangan nilai. Digitalisasi dapat meningkatkan akses dan efisiensi, namun dapat mengurangi pilihan bagi pengguna yang tidak memiliki perangkat atau literasi digital. Perubahan struktur dapat memperjelas akuntabilitas sekaligus mengurangi otonomi profesional. Sebelum menerapkan perubahan, pemimpin dapat memetakan manfaat, biaya, penerima manfaat, kelompok yang

menanggung beban, dan nilai yang mungkin terancam. Keterlibatan pegawai serta pengguna layanan membantu mengidentifikasi konsekuensi yang tidak terlihat dari meja perencanaan.

Misalnya, suatu perusahaan mengumumkan bahwa keselamatan kerja merupakan nilai utama. Pada saat bersamaan, sistem bonus mengaitkan penghargaan dengan volume produksi dan tidak memperhitungkan pelaporan insiden nyaris celaka. Pegawai dapat menyimpulkan bahwa produksi sesungguhnya lebih dihargai daripada keselamatan. Pimpinan dapat memeriksa pola lembur, kejadian, laporan bahaya, respons atas masukan, dan pengalaman pekerja untuk menilai konsistensi antara pesan dan praktik. Perbaikan nilai memerlukan perubahan struktur insentif dan perlindungan bagi pegawai yang melaporkan risiko, bukan sekadar memperbarui poster.

Nilai juga membentuk relasi dengan pemasok dan mitra. Keputusan pengadaan yang hanya mengutamakan harga terendah dapat mendorong penghematan, namun mungkin berkonflik dengan standar keselamatan, kondisi kerja, ketahanan pasokan, atau dampak lingkungan. Manajer perlu menetapkan kriteria yang terkait langsung dengan tujuan organisasi, melakukan uji tuntas, dan memberi bobot yang transparan. Kontrak kemudian menjadi cara menerjemahkan harapan nilai ke dalam tanggung jawab, pemantauan, serta mekanisme penyelesaian masalah.

Kerangka praktis untuk keputusan organisasi dimulai dengan merumuskan persoalan dan tujuan secara spesifik. Berikutnya, identifikasi nilai yang terlibat dan pihak yang mengalaminya. Kembangkan beberapa pilihan tindakan, lalu nilai dampak langsung, dampak jangka panjang, risiko, distribusi manfaat, dan konsistensi dengan kewajiban. Keputusan akhir perlu mencatat alasan, ketidakpastian, indikator pemantauan, serta kondisi yang akan memicu peninjauan ulang. Proses ini tidak menjamin semua pihak setuju, tetapi dapat meningkatkan kualitas alasan dan akuntabilitas.

8. Aksiologi dalam pendidikan dan pembentukan karakter

Pendidikan selalu membawa pandangan tentang manusia seperti apa yang hendak dibentuk dan masyarakat seperti apa yang hendak didukung. Selain menyampaikan pengetahuan dan keterampilan, sekolah memilih nilai apa yang tampak dalam kurikulum, aturan, relasi guru-siswa, metode evaluasi, dan budaya sekolah. Pertanyaan aksiologis membantu pendidik menilai apakah tujuan yang dinyatakan tercermin dalam pengalaman belajar sehari-hari. Jika sekolah mengajarkan kreativitas tetapi menilai semua tugas hanya melalui jawaban seragam, terdapat ketegangan antara nilai inovasi dan praktik evaluasi.

Pendidikan nilai berbeda dari ceramah tentang daftar kebajikan. Siswa perlu mengalami kesempatan untuk membuat alasan, mendengarkan perspektif lain, menilai konsekuensi, dan merevisi pendirian ketika bukti atau pertimbangan baru muncul. Guru dapat menggunakan studi kasus tentang kejujuran akademik, penggunaan AI, pembagian sumber daya, atau konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Tujuannya bukan memaksa jawaban identik, melainkan membangun kemampuan memberi alasan, memahami batas hak, dan bertanggung jawab atas pilihan.

Nilai pendidikan juga perlu dibahas dalam evaluasi hasil belajar. Nilai ujian memberikan informasi penting tentang penguasaan materi, tetapi tidak mencakup seluruh tujuan pembelajaran. Asesmen dapat menggabungkan bukti pengetahuan, kemampuan menerapkan konsep, kolaborasi, refleksi, dan perkembangan kompetensi. Pemilihan indikator harus sesuai tujuan dan tidak membebani siswa dengan ukuran yang tidak relevan. Refleksi aksiologis menjaga agar kemudahan pengukuran tidak menggantikan tujuan pendidikan itu sendiri.

Dalam pendidikan tinggi, otonomi akademik, integritas, keterbukaan ilmiah, relevansi sosial, dan keadilan akses dapat saling mendukung tetapi kadang bertegangan. Kebijakan penggunaan AI generatif, misalnya,

perlu mempertimbangkan pembelajaran, kejujuran, privasi, kesetaraan akses, dan kesiapan dosen. Larangan total mungkin tidak mengembangkan literasi penggunaan yang bertanggung jawab; penggunaan tanpa panduan dapat merusak tujuan asesmen. Kebijakan yang baik menerangkan tujuan tugas, penggunaan yang diperbolehkan, kewajiban deklarasi, serta proses penilaian yang sesuai.

Penelitian dalam pendidikan menunjukkan bahwa pendekatan berorientasi nilai dapat memengaruhi desain pembelajaran, meskipun temuan pada satu sistem pendidikan tidak otomatis berlaku pada semua konteks. Studi Dauyenov et al. (2022), misalnya, menguji kerangka aksiologis dalam lingkungan belajar di Kazakhstan. Hasil dan keterbatasan konteks studi tersebut dapat menjadi bahan diskusi, bukan resep universal. Pendidik di Indonesia perlu menguji kesesuaian gagasan melalui dialog dengan guru, siswa, keluarga, dan komunitas setempat.

Sebuah SMA dapat mengklaim bahwa sekolah menghargai kejujuran dan rasa ingin tahu. Dalam praktik, guru dapat meninjau apakah siswa memiliki ruang mengakui ketidaktahuan tanpa dipermalukan, apakah kesalahan dipakai sebagai bahan belajar, serta apakah tugas mendorong pemahaman atau sekadar kepatuhan. Jika sanksi terhadap kesalahan dibuat sangat berat, siswa mungkin menyembunyikan masalah atau menggunakan jalan pintas. Jika standar akademik terlalu longgar, nilai kejujuran dan mutu pembelajaran ikut melemah. Analisis aksiologis mencari kebijakan yang menjaga integritas sekaligus memelihara lingkungan yang memungkinkan siswa belajar dari kesalahan.

Guru dan pimpinan sekolah juga harus membedakan nilai yang hendak dikembangkan dari nilai yang hanya diuji. Sikap saling menghormati tidak dapat dinilai hanya dengan satu skala persepsi; ia tampak dalam pola interaksi, penanganan perundungan, akses berbicara, dan penyelesaian konflik. Data kuantitatif dapat menunjukkan kecenderungan, sedangkan observasi dan percakapan menjelaskan bagaimana norma dihidupi. Penggunaan beragam bukti mencegah sekolah menyimpulkan bahwa nilai sudah tertanam hanya karena siswa mengingat definisinya.

9. Aksiologi dalam layanan kesehatan dan pelayanan publik

Layanan kesehatan mengandung nilai yang sering harus diseimbangkan: keselamatan, manfaat klinis, otonomi pasien, keadilan, privasi, empati, efisiensi, dan akses. Keputusan klinis tidak hanya memilih tindakan yang memiliki bukti, tetapi juga mempertimbangkan keadaan pasien, preferensi, risiko, dan sumber daya. Prinsip penghormatan terhadap otonomi menuntut informasi yang dapat dipahami dan persetujuan yang bermakna. Prinsip keadilan mengarahkan perhatian pada distribusi layanan, bukan hanya hasil rata-rata.

Clinical pathway menunjukkan bagaimana nilai menjadi tertanam dalam prosedur. Pathway dapat mengurangi variasi yang tidak perlu dan membantu koordinasi tim, tetapi harus memberi ruang bagi kondisi khusus pasien. Kepatuhan tidak selalu identik dengan mutu apabila terdapat alasan klinis yang membenarkan penyimpangan. Rumah sakit dapat menilai apakah protokol didukung bukti, apakah pengecualian dicatat dengan baik, apakah pasien memperoleh penjelasan, dan apakah audit digunakan untuk pembelajaran, bukan sekadar menghukum tenaga kesehatan.

Dalam pelayanan publik, nilai keadilan prosedural, kepastian, keterbukaan, responsivitas, dan penggunaan dana yang bertanggung jawab menjadi dasar legitimasi. Program bantuan dapat mencapai target jumlah penerima tetapi gagal menjangkau warga paling rentan karena kriteria administrasi terlalu rumit. Evaluasi aksiologis menanyakan bukan hanya apakah anggaran terserap, tetapi siapa yang dapat mengakses program, apakah prosesnya dapat dipahami, dan apakah manfaat dibagikan sesuai tujuan publik.

Kebijakan publik sering menghadapi pluralitas nilai masyarakat. Pertimbangan kebebasan, perlindungan kesehatan, kelestarian lingkungan, kesempatan ekonomi, dan hak komunitas lokal tidak selalu menghasilkan

kesimpulan sama. Pemerintah perlu menyampaikan dasar keputusan, mengungkap bukti dan ketidakpastian, menyediakan ruang konsultasi yang bermakna, serta memberi mekanisme koreksi. Konsultasi bukan sekadar formalitas apabila masukan warga tidak dapat memengaruhi desain atau mitigasi dampak.

Contoh sederhana terlihat dalam digitalisasi layanan administrasi. Kanal daring dapat mengurangi waktu perjalanan dan mempercepat pelacakan berkas. Akan tetapi, warga yang tinggal di daerah dengan jaringan lemah, memiliki disabilitas, atau tidak terbiasa dengan formulir digital dapat mengalami hambatan baru. Evaluasi keberhasilan seharusnya memeriksa waktu layanan sekaligus tingkat penyelesaian, keluhan, kebutuhan bantuan tatap muka, dan perbedaan akses antarwilayah. Menyediakan pendampingan atau pilihan kanal alternatif tidak selalu berarti menolak efisiensi; langkah itu dapat menjadi cara menjaga nilai kesetaraan dalam perubahan teknologi.

Dalam keadaan darurat, pertimbangan nilai dapat berubah karena waktu dan ancaman. Prioritas untuk bertindak cepat mungkin diperlukan, tetapi prosedur darurat tidak otomatis menghapus kebutuhan akuntabilitas dan evaluasi pascakejadian. Kebijakan yang baik menentukan batas kewenangan, jangka waktu, perlindungan hak, cara merekam alasan keputusan, dan mekanisme memulihkan kerugian. Kerangka aksiologis membantu membedakan tindakan sementara yang proporsional dari pembatasan yang berlanjut tanpa alasan memadai.

10. Aksiologi, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan

Kebijakan lingkungan memperlihatkan bahwa nilai dapat melampaui manfaat langsung bagi manusia saat ini. Perlindungan keanekaragaman hayati dapat didukung oleh nilai instrumental seperti jasa ekosistem, nilai intrinsik kehidupan, identitas budaya, tanggung jawab antargenerasi, dan keadilan bagi masyarakat yang bergantung pada alam. Jika kebijakan hanya menghitung keuntungan finansial jangka pendek, beberapa nilai tersebut dapat hilang dari analisis. Aksiologi mendorong pengambil keputusan menjelaskan alasan yang dipakai dan pihak yang suaranya dipertimbangkan.

Pembangunan berkelanjutan memerlukan pemahaman tentang hubungan antara kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan batas ekologis. Hubungan tersebut bukan hanya persoalan teknis memilih indikator. Pilihan mengenai tingkat konsumsi, distribusi risiko, hak atas sumber daya, dan tanggung jawab historis memiliki dimensi nilai. Misalnya, transisi energi perlu memperhitungkan akses energi yang terjangkau, pekerjaan, keselamatan, dampak tambang, emisi, serta perlindungan masyarakat lokal. Tidak ada satu ukuran tunggal yang otomatis menyelesaikan semua pertimbangan itu.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan konservasi, pengelolaan gambut, tata kelola hutan, pembangunan infrastruktur, dan adaptasi iklim perlu memasukkan pengetahuan masyarakat setempat. Nilai budaya dan mata pencaharian tidak selalu mudah dikuantifikasi, tetapi tidak berarti tidak relevan. Proses deliberatif dapat mempertemukan data ilmiah, hak komunitas, pengalaman lokal, serta tujuan nasional. Peneliti perlu menghindari romantisasi masyarakat lokal dan sebaliknya menilai bukti, keragaman kepentingan, serta distribusi kekuasaan secara cermat.

Penerapan aksiologi dalam keberlanjutan dapat memakai matriks nilai-pemangku kepentingan. Untuk setiap opsi kebijakan, identifikasi nilai yang didukung, kelompok yang menerima manfaat, kelompok yang menanggung risiko, skala waktu, keterbalikan dampak, dan mekanisme kompensasi atau mitigasi. Matriks ini tidak menggantikan analisis ekonomi atau ilmiah; ia memperlihatkan dimensi yang biasanya tersembunyi dalam model teknis dan membantu mengarahkan dialog publik.

11. Aksiologi dalam kecerdasan buatan dan transformasi digital

Sistem AI memuat pilihan nilai sejak awal: tujuan apa yang dioptimalkan, data apa yang dipakai, kesalahan mana yang dianggap paling serius, siapa yang dapat mengoreksi hasil, dan bagaimana keputusan berdampak pada manusia. Model yang memaksimalkan kecepatan dapat mengorbankan penjelasan; model yang menurunkan biaya dapat memindahkan beban kepada pengguna; sistem rekomendasi dapat meningkatkan relevansi sekaligus mempersempit keberagaman informasi. Aksiologi membantu mengungkap tujuan dan trade-off tersebut, bukan menganggap performa teknis sebagai ukuran tunggal keberhasilan.

Dalam penerimaan pegawai berbasis AI, nilai efisiensi dapat mendukung penyaringan lamaran dalam jumlah besar. Namun, nilai keadilan menuntut pemeriksaan apakah data historis mereplikasi bias, apakah kriteria terkait dengan pekerjaan, dan apakah pelamar dapat memahami atau mengajukan keberatan atas hasil. Akurasi rata-rata dapat menyembunyikan kesalahan yang lebih sering terjadi pada kelompok tertentu. Karena itu, evaluasi perlu memeriksa hasil menurut kelompok, konteks penggunaan, dan jenis keputusan, serta menetapkan manusia yang bertanggung jawab atas tinjauan.

Nilai privasi dan kendali manusia menjadi penting ketika sistem mengolah data mahasiswa, pasien, pegawai, atau warga. Organisasi harus mempertimbangkan kebutuhan pengumpulan data, tujuan penggunaan, batas retensi, akses, keamanan, dan kemungkinan penggunaan sekunder. Persetujuan tidak selalu cukup jika relasi kuasa membuat penolakan sulit dilakukan. Aksiologi mengarahkan perhatian pada kondisi nyata pilihan, bukan hanya keberadaan kotak centang dalam aplikasi.

Perkembangan agen AI otonom menambah pertanyaan baru tentang bagaimana nilai yang diumumkan berubah menjadi nilai yang diterapkan dalam rutinitas. Glaser et al. (2026) mengkaji bagaimana interaksi manusia-AI dapat mengubah nilai organisasi yang dinyatakan menjadi nilai yang diwujudkan. Kerangka tersebut menekankan bahwa parameter sistem, integrasi ke dalam proses, dan tindakan aktual dapat membentuk hasil nilai yang tidak persis sama dengan niat awal. Ini adalah pengembangan konseptual baru dan perlu dibaca sebagai agenda kajian yang sedang berkembang, bukan konsensus final.

Tata kelola AI yang bertanggung jawab memerlukan praktik struktural, relasional, dan prosedural, termasuk penetapan akuntabilitas, pelibatan pihak terkait, pemantauan, dan mekanisme koreksi. Tinjauan Papagiannidis et al. (2025) menyoroti kesenjangan antara prinsip AI yang dinyatakan dan cara prinsip itu dioperasionalkan dalam siklus desain, penerapan, pemantauan, serta evaluasi. Aksiologi berguna untuk menjembatani prinsip abstrak seperti keadilan dan kesejahteraan dengan aturan produk, pengujian, indikator, kontrak, dan keputusan operasional.

Organisasi dapat menerjemahkan nilai menjadi spesifikasi yang dapat diuji. Bila privasi merupakan komitmen, tim perlu mendokumentasikan alasan pengumpulan setiap kategori data, membatasi akses, dan menguji apakah tujuan dapat dicapai dengan data lebih sedikit. Bila keadilan menjadi tujuan, tim perlu menentukan kelompok pembanding, jenis kesalahan yang dipantau, serta tindakan ketika ada perbedaan dampak. Bila akuntabilitas penting, harus jelas siapa yang meninjau rekomendasi dan siapa yang dapat menghentikan sistem. Spesifikasi ini membuat komitmen dapat diperiksa sepanjang siklus hidup teknologi.

Penggunaan AI juga mengandung nilai epistemik. Pengguna mungkin memberi bobot berlebihan pada jawaban yang disajikan dengan bahasa lancar atau angka presisi, walaupun sumbernya tidak kuat. Rekomendasi UNESCO (2021) tentang etika AI menempatkan hak asasi manusia dan martabat manusia sebagai pertimbangan pokok dalam pengembangan dan penggunaan sistem. Sistem yang menyertakan jejak sumber, tingkat ketidakpastian, dan batas cakupan dapat membantu pengguna menilai informasi, tetapi desain tersebut tetap perlu diuji dengan perilaku nyata. Literasi AI mengajarkan bahwa keluaran adalah klaim yang perlu diperiksa, bukan otoritas otomatis. Praktik ini menjaga nilai kebenaran dan tanggung jawab intelektual dalam penggunaan teknologi.

Untuk institusi pendidikan, rumah sakit, dan pemerintah Indonesia, penerapan AI sebaiknya dimulai dengan pertanyaan tujuan dan nilai layanan. Siapa yang berwenang mengubah rekomendasi mesin? Bagaimana warga meminta penjelasan? Apakah data representatif? Apakah keputusan dapat diaudit? Apakah ada jalur manual jika sistem gagal? Jawaban perlu disesuaikan dengan risiko dan kapasitas lembaga. AI dapat mendukung keputusan, tetapi tanggung jawab atas nilai dan konsekuensi tetap memerlukan tata kelola manusia dan institusi.

12. Langkah praktis melakukan analisis aksiologis

Langkah pertama adalah merumuskan persoalan dan keputusan yang hendak dibuat. Pertanyaan seperti "apakah sistem ini baik?" terlalu luas. Pertanyaan yang lebih dapat dianalisis ialah "nilai apa yang perlu dipenuhi ketika sistem AI menyaring pendaftar beasiswa, dan bagaimana menilai pembagian risiko kesalahan?" Rumusan yang jelas mengidentifikasi konteks, pilihan, pihak yang terdampak, dan ruang waktu. Ia juga mencegah diskusi nilai berubah menjadi daftar slogan yang tidak terkait keputusan.

Langkah kedua ialah memetakan pemangku kepentingan dan nilai yang mereka anggap penting. Pihak terkait dapat mencakup penerima layanan, pekerja garis depan, pimpinan, keluarga, komunitas, pembuat kebijakan, dan kelompok yang tidak mudah terwakili. Wawancara, lokakarya, analisis dokumen, survei, atau forum deliberatif dapat digunakan sesuai konteks. Pemetaan ini bukan berarti semua klaim mempunyai bobot sama, melainkan bahwa alasan dan pengalaman relevan tidak hilang sebelum evaluasi dimulai.

Langkah ketiga ialah membedakan nilai yang menjadi tujuan, batas, dan sarana. Keselamatan dapat menjadi batas minimum; efisiensi dapat menjadi sarana; martabat pengguna dapat menjadi tujuan yang harus diwujudkan dalam interaksi. Jika organisasi tidak membedakan peran nilai, penilaian dapat menjadi kabur. Misalnya, "meningkatkan kepuasan" tidak boleh digunakan untuk menutupi pelanggaran privasi atau ketidakadilan distribusi.

Langkah keempat adalah mengidentifikasi konflik dan membuat pilihan alternatif yang nyata. Catat siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung biaya, dampak langsung dan jangka panjang, kemungkinan dampak tak terduga, serta tingkat ketidakpastian. Bila mungkin, evaluasi pilihan melalui beberapa skenario. Penilaian multi-kriteria dapat membantu memperlihatkan konsekuensi yang tidak dapat diringkas menjadi satu angka, tetapi bobot dan skala penilaian tetap harus dijelaskan karena keduanya membawa nilai.

Langkah kelima ialah memilih tindakan dengan menyampaikan alasan dan pengaman. Keputusan perlu menunjukkan nilai yang diprioritaskan, nilai yang mungkin dikorbankan, alasan untuk pembatasan, dan mekanisme mitigasi. Tindakan harus dapat ditinjau jika asumsi salah atau situasi berubah. Dalam keputusan berdampak tinggi, dokumentasi yang jelas membantu audit, pembelajaran organisasi, dan pengajuan keberatan oleh pihak yang terdampak.

Langkah terakhir adalah memantau apakah nilai yang dikehendaki sungguh terwujud. Ukur hasil, tetapi lengkapi indikator dengan umpan balik, pemeriksaan kasus, audit kelompok, serta evaluasi proses. Bila hasil menyimpang dari komitmen, cari sumbernya: mungkin definisi terlalu sempit, insentif bertentangan, implementasi tidak memadai, atau kelompok tertentu mengalami beban yang tidak terdeteksi. Aksiologi menjadi proses belajar berulang, bukan pernyataan pembuka yang selesai setelah proposal disetujui.

13. Kekeliruan umum dalam memahami aksiologi

Kekeliruan pertama adalah mengartikan aksiologi sebagai "etika penelitian" saja. Etika merupakan bagian penting, tetapi nilai mencakup juga tujuan, manfaat, estetika, keadilan sosial, kepentingan epistemik, dan

prioritas kebijakan. Kekeliruan kedua ialah menyamakan nilai dengan sikap pribadi. Sikap adalah evaluasi terhadap objek atau kebijakan tertentu, sedangkan nilai biasanya merupakan tujuan yang lebih umum dan melintasi situasi.

Kekeliruan ketiga adalah menganggap suatu instrumen bebas nilai karena memakai angka. Pilihan indikator, kategori, ambang, dan bobot selalu mengandung pertimbangan tentang apa yang dianggap penting. Kekeliruan keempat adalah mengira pengungkapan nilai membuat penelitian tidak objektif. Pengungkapan yang baik memungkinkan pembaca menelusuri pengaruh nilai, memeriksa bukti, dan menilai langkah mitigasi.

Kekeliruan kelima ialah menganggap semua nilai dapat disatukan menjadi satu skor. Beberapa nilai memang dapat dibandingkan untuk kebutuhan tertentu, tetapi martabat, keselamatan, kebebasan, dan keadilan tidak selalu dapat ditukar seperti satuan biaya. Nilai juga dapat menjadi batas moral, bukan sekadar komponen yang diberi bobot rendah ketika keuntungan finansial tinggi. Analisis aksiologis harus mempertimbangkan apakah kuantifikasi membantu atau justru menutupi perbedaan mendasar.

Kekeliruan keenam ialah menyatakan “nilai organisasi” tanpa memeriksa praktik. Daftar nilai di dinding belum menjadi budaya. Ukurannya mencakup keputusan tentang promosi, pengadaan, keselamatan, layanan, perlindungan pelapor, distribusi kerja, serta respons terhadap kesalahan. Ketidaksesuaian antara deklarasi dan pengalaman dapat menjadi sumber sinisme dan hilangnya kepercayaan.

14. Implikasi bagi pemimpin dan akademisi

Pemimpin dapat menggunakan pertanyaan aksiologis sebelum menetapkan indikator atau mengadopsi teknologi: nilai apa yang ingin dijaga, nilai apa yang sedang dikorbankan, bagaimana dampaknya didistribusikan, dan siapa yang dapat mengoreksi keputusan? Jawaban yang disampaikan dengan jujur meningkatkan kualitas komunikasi, sekalipun keputusan tetap mengandung ketidakpastian. Organisasi yang menganggap nilai sebagai bagian dari tata kelola dapat menyelaraskan strategi, anggaran, insentif, dan pengalaman pemangku kepentingan.

Akademisi dapat mengintegrasikan aksiologi dalam pengajaran metodologi dengan meminta mahasiswa menunjukkan konsekuensi nilai dari keputusan riset mereka. Misalnya, ketika mahasiswa memilih indikator kinerja guru, mereka dapat menguji siapa yang diuntungkan oleh definisi tersebut dan aspek pekerjaan mana yang tidak tampak. Saat memilih metode, mereka dapat menerangkan nilai yang mendasari bentuk bukti yang dianggap relevan. Latihan semacam ini membantu mahasiswa memahami bahwa refleksi filosofis memiliki dampak pada desain empiris dan kebijakan.

Aksiologi juga dapat memperkuat kualitas publikasi akademik. Penulis menjelaskan alasan pemilihan masalah, potensi manfaat, pertimbangan etis, konflik kepentingan, dan batas penerapan hasil. Pembaca dapat menilai apakah rekomendasi sejalan dengan bukti serta apakah nilai yang diusulkan relevan bagi konteks. Ketelitian ini penting ketika temuan diterjemahkan menjadi program, standar, atau keputusan yang memengaruhi orang lain.

Kesimpulan

Aksiologi adalah kajian filosofis tentang nilai: apa yang dianggap bernilai, mengapa nilai itu penting, bagaimana nilai berhubungan, dan bagaimana penilaian dapat dibenarkan. Ia mencakup wilayah moral, estetis, sosial, politik, epistemik, dan praktis. Aksiologi berbeda dari ontologi yang menelaah keberadaan dan epistemologi yang menelaah pengetahuan, tetapi ketiganya berhubungan dalam penelitian dan pengambilan

keputusan. Etika merupakan wilayah yang dekat dan penting, sementara cakupan aksiologi lebih luas daripada kewajiban moral saja.

Dalam penelitian, aksiologi menerangkan mengapa persoalan dipilih, nilai apa yang membimbing prosedur, bagaimana peserta diperlakukan, dan bagaimana pengetahuan digunakan. Dalam manajemen, ia membantu menilai kesenjangan antara nilai organisasi yang dinyatakan dengan keputusan, insentif, serta praktik. Dalam pendidikan, layanan kesehatan, kebijakan publik, dan keberlanjutan, ia memperlihatkan tujuan dan konsekuensi yang tidak selalu tertangkap oleh satu indikator. Dalam AI, ia menuntut agar nilai diterjemahkan menjadi desain, pengujian, akuntabilitas, dan koreksi yang nyata.

Aksiologi tidak memberi jawaban mekanis untuk semua konflik nilai. Ia menyediakan disiplin bertanya dan alasan yang dapat diperiksa: siapa yang menentukan nilai; pihak mana yang terdampak; bukti apa yang relevan; nilai apa yang menjadi batas; dan bagaimana hasilnya dipantau. Dengan membuat pertimbangan ini terbuka, akademisi dan pemimpin dapat mengambil keputusan secara lebih bertanggung jawab, menjelaskan konsekuensinya, dan memperbaiki tindakan ketika pengalaman menunjukkan bahwa nilai yang dijanjikan belum terwujud.

Glossarium

Aksiologi — Kajian filosofis mengenai nilai, sifatnya, hubungannya, dan alasan untuk menilai sesuatu sebagai baik, berguna, indah, atau layak.

Etika — Kajian mengenai tindakan yang benar, kewajiban, hak, karakter, dan prinsip perlakuan terhadap sesama.

Nilai epistemik — Nilai yang berkaitan dengan mutu pengetahuan, seperti kebenaran, ketepatan, konsistensi, dan keterbukaan terhadap bukti.

Nilai estetis — Nilai yang berkaitan dengan keindahan, bentuk, ekspresi, dan pengalaman artistik.

Nilai instrumental — Nilai sesuatu karena ia menjadi sarana untuk mencapai tujuan lain.

Nilai intrinsik — Nilai sesuatu karena dianggap berharga pada dirinya sendiri, bukan hanya sebagai sarana.

Nilai moral — Standar evaluatif yang berhubungan dengan baik-buruk, kewajiban, hak, keadilan, serta tanggung jawab.

Nilai organisasi — Prinsip atau prioritas yang membimbing identitas, keputusan, kebijakan, dan praktik suatu organisasi.

Refleksivitas — Proses memeriksa bagaimana posisi, asumsi, kepentingan, dan relasi peneliti memengaruhi penelitian.

Trade-off nilai — Situasi ketika pemenuhan satu nilai membatasi atau mengurangi pemenuhan nilai lain.

Nilai yang dinyatakan — Prinsip yang secara resmi dikomunikasikan oleh individu atau organisasi.

Nilai yang diwujudkan — Nilai yang tercermin dalam keputusan, rutinitas, perilaku, insentif, dan akibat nyata.

Pemangku kepentingan — Orang atau kelompok yang memengaruhi, dipengaruhi, atau memiliki kepentingan dalam suatu keputusan.

Keadilan prosedural — Penilaian atas kewajaran proses yang digunakan untuk membuat keputusan dan memperlakukan pihak terkait.

Daftar Pustaka

Brown, M. E. L., & Dueñas, A. N. (2020). A medical science educator's guide to selecting a research paradigm: Building a basis for better research. Medical Science Educator, 30, 545–553. https://doi.org/10.1007/s40670-019-00898-9

Dauyenov, Y., Zhumataeva, E., & Orynbekova, A. (2022). Methodological framework for the axiological paradigm in the learning environment. Frontiers in Education, 7, 895470. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.895470

Glaser, V. L., Sloan, J., Valadão, R., & Micelotta, E. R. (2026). The axiology of AI agents: How human-AI interaction transforms values from espoused to enacted. Academy of Management Review. Advance online publication. https://doi.org/10.5465/amr.2024.0494

Papagiannidis, E., Mikalef, P., & Conboy, K. (2025). Responsible artificial intelligence governance: A review and research framework. The Journal of Strategic Information Systems, 34(2), 101885. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2024.101885

Schroeder, M. (2026). Value theory. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), The Stanford encyclopedia of philosophy (Summer 2026 ed.). https://plato.stanford.edu/archives/sum2026/entries/value-theory/

Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology (Vol. 25, pp. 1–65). Academic Press. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60281-6

Schwartz, S. H. (2012). An overview of the Schwartz theory of basic values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116

Schwartz, S. H., Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Fischer, R., Beierlein, C., Ramos, A., Verkasalo, M., Lönnqvist, J.-E., Demirutku, K., Dirilen-Gumus, O., & Konty, M. (2012). Refining the theory of basic individual values. Journal of Personality and Social Psychology, 103(4), 663–688. https://doi.org/10.1037/a0029393

UNESCO. (2021). Recommendation on the ethics of artificial intelligence. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137